



Responsibilitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Persampahan Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Meiday Misbah, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadimanuddin@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 April 2025

Revised 04 Mei 2025

Accepted 01 Juni 2025

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Misbah, M. & Saraan, M. I. K, (2025). Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Sicanang di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. *SAJJANA: Public Administration Review*.3(1)

ABSTRAK

Responsibilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh seorang tokoh pemerintah atau birokrat yang menunjukkan profesionalitas dan capaian yang telah diraih dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sampah merupakan isu lokal dengan implikasi global karena populasi dunia terus bertambah, begitu pula jumlah sampah yang dihasilkan. Masalah lingkungan yang cukup sering terjadi di daerah pada umumnya adalah masalah sampah yang dihasilkan pada sekitar lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari, hal ini sangat penting agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya, karena permasalahan sampah ini dinilai cukup serius. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. teknik pengumpulan data adalah proses penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti secara mendalam dengan memanfaatkan instrument yang relevan, seperti pedoman wawancara, catatan, lapangan atau dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan sosial kepada kecamatan sei rampah kurang efisien karna dari yang peneliti lihat tidak adanya upaya berbeda yang dilakukan dinas lingkungan sosial dalam penanganan sampah di masyarakat bahkan hamper sama dengan kepemimpinan sebelumnya. tidak adanya upaya yang benar benar serius dalam pengelolaan sampah itu sendiri terkhususnya dalam proses lapangan langsung. komitmen yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah tentang upaya-upaya dan rancangan rancangan yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan tahap awal yang benar benar dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai, masalahnya pada dinas lingkungan hidup tidak ada upaya serius dalam pengeloaan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Responibilitas, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Responsibility is a form of accountability given by a government figure or bureaucrat who shows professionalism and achievements that have been achieved in providing public services, and is able to work in accordance with applicable regulations. Waste management is a local issue with global implications because the world's population continues to grow, as does the amount of waste produced. Environmental problems that occur quite often in the regions in general are the problems of waste generated around the environment or waste generated by daily activities, this is very important so that it becomes the attention of the local government that handles it, because this waste problem is considered quite serious. In this study the authors used



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. <http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

a Qualitative method with a Descriptive approach. data collection technique is the process of extracting information carried out by researchers in depth by utilizing relevant instruments, such as interview guidelines, notes, field or documentation. The results of this study indicate that waste management carried out by the social environment service to the sei rampah sub-district is less efficient because from what researchers see there are no different efforts made by the social environment service in handling waste in the community, it is almost the same as the previous leadership. there is no really serious effort in waste management itself, especially in the direct field process. the commitment made by the environmental service in waste management about the efforts and designs made, especially in waste management. Human resource management is the initial stage that is really done so that the goals of an organization can be achieved, the problem is that in the environmental service there is no serious effort in managing human resources

Keywords: Responsibility, Waste Management, Environment Agency

1. Pendahuluan

Responsibilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh seorang tokoh pemerintah atau birokrat yang menunjukkan profesionalitas dan capaian yang telah diraih dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dwiyanto (2006:52) mengemukakan bahwa responsibilitas memperlihatkan bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administratif serta bersesuaian dengan kebijakan organisasi baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Pengelolaan sampah merupakan isu lokal dengan implikasi global karena populasi dunia terus bertambah, begitu pula jumlah sampah yang dihasilkan. Di Indonesia sendiri dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk “The Atlas Of Sustainable Development Goals 2023” menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 5 sebagai Negara penghasil sampah terbesar di dunia pada 2020 yang mana Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah per tahunnya, (Katadata.co.id, diakses pada 26 Oktober 2023). Dengan meningkatnya timbulan sampah yang terjadi ini, sangat penting pula pemerintah memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif. Namun, pemerintah kota dan daerah masih mengalami atau menghadapi banyak tantangan dalam hal pengelolaan limbah padat mereka dengan benar.

Masalah lingkungan yang cukup sering terjadi di daerah pada umumnya adalah masalah sampah yang dihasilkan pada sekitar lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari, hal ini sangat penting agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya, karena permasalahan sampah ini dinilai cukup serius.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pasal 20 penanganan sampah menjelaskan pemerintah wajib melakukan penanganan sampah yang meliputi, pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Selain itu berdasarkan observasi awal peneliti melalui media masa, peneliti menemukan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem Open Dumping. Menurut Mubarak dalam (Hardiyanti & Subowo, 2018) Open Dumping merupakan suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan masalah. Pada lahan penimbunan terbuka, berbagai macam hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Sehingga masyarakat sekitar mengeluhkan adanya sampah yang semakin menggunung dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut.

Dinas lingkungan hidup memiliki program pengkutan sampah rumah ke rumah kepada masyarakat yang berlangganan kepada dinas lingkungan hidup yaitu dengan memberikan tong sampah di setiap rumah, tapi proses yang dilakukan tidak dilakukan sangat matang tidak adanya lembaga pengawasan kepada

masyarakat yang artinya kepada masyarakat yang berlangganan satu rumah tapi di tong sampah seakan akan macam ada lima rumah. Apa lagi sarana dan prasana yang dimiliki dinas lingkungan hidup sangat sangat tidak memadai dalam pengelolaan sampah yang serius misalnya dinas lingkungan hidup memiliki lima mobil pengangkut sampah tapi hanya dua yang bisa di gunakan sedangkan dinas lingkungan hidup menanggung jawabin 7 kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan persampahan di kecamatan sei rampah, kabupaten serdang bedagai tentunya semua pihak termasuk organisasi yang ada tentunya mempunyai peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dinas lingkungan hidup selaku organisasi perangkat daerah yang diberi tanggungjawab oleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai semestinya harus memperlihatkan perannya dalam pengelolaan sampah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. menurut Pasolong (2020 : 75) Mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang pada saat melakukan penelitian yang mana di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada secara objektif.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan sei rampah serta di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwasannya di Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi sehingga memiliki jumlah sampah yang cukup tinggi pula dan peneliti mengambil focus meneliti lokasi di TPA kecamatan sei rampah merujuk menjadi tempat pembuangan terakhir.

2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, Sumber data adalah segala sesuatu yang berguna dalam memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Sumber data merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah metode pengumpulan data penelitian untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data (peneliti) melalui sumbernya dengan melakukan penelitian dari objek penelitiannya Pasolong, (2020 : 70) dengan melakukan observasi wawancara (interview) dengan beberapa informan yang telah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua data yang dikumpulkan atau digunakan oleh peneliti yang bukan pengelolanya yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan dari instansi, atau berupa dokumen, merupakan data sekunder, Pasolong (2020 : 70). Adapun data sekunder dari penelitian ini merupakan dokumen penting, arsip-arsip, serta buku-buku dan penelitian terdahulu juga undang-undang yang berlaku, serta memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2021 : 296) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2021 : 297) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dimana peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data fakta yang peneliti temukan secara langsung dilapangan melalui observasi terhadap subjek atau objek penelitian. Ada tiga jenis observasi diantaranya :

a. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung di dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian yang mana peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.

b. Observasi terus-terang atau tersamar

Observasi terus-terang atau tersamar yaitu melakukan pengumpulan data yang mana peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Namun dalam keadaan tertentu peneliti juga tidak terus terang atau tersamarkan dalam observasi yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c. Observasi tak berstruktur

Observasi tak berstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi oleh peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Sugiyono (2021 : 304) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Proses wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah model wawancara indept (wawancara mendalam) penulis melakukan wawancara langsung dengan informan mendalam seputar dengan yang penulis teliti. Penulis menentukan informan yang langsung memberikan jawaban yang akurat terhadap kajian yang penulis teliti. Peneliti langsung datang ke kantor terkait tetapi terlebih dahulu peneliti membuat perjanjian dengan narasumber yang akan dimintai keterangan seputar kolaborasi.

3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2021 : 314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk gambar, karya-karya monumental, atau tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

2.3 Penentuan Informan

Peneliti menggunakan Teknik purposive sampling dalam memilih dan menentukan informan. Kriteria ini penting agar informan dapat memberikan 47 informasi yang bisa dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2021). Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling dengan harapan informan benar-benar menguasai informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk penelitian. Maka informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai	1
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	3
3	Camat Sei Rampah	1

No	Informan	Jumlah
4	LSM Solidaritas Perempuan Pekerja Seks	3
5	Masyarakat Kelurahan Sei Rampah	10

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik analisis model Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman dalam Moleong (2004 : 221) ada 3 model komponen analisa data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun 3 komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction), yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data dari catatan tertulis yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan pengamatan di lapangan yang bertujuan agar memudahkan dalam menggunakan isi dari data tersebut.
2. Penyajian data (data display), dalam penyajian data peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang didapat dan menyusunnya, serta membuat suatu pijakan yang akan disajikan sebagai dasar dalam membuat sebuah kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti lebih banyak terlibat dalam kegiatan penyajian data (display) dari data yang dikumpulkan, serta menganalisis data tersebut agar lebih mudah dalam membuat teks naratif yang bersesuaian dengan data yang ada.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian sedang berlangsung. Verifikasi ditahap ini berupa tinjauan ulang dari pemikiran seorang peneliti yang merupakan hasil dari catatan lapangan yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan Data dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran dari data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Keabsahan data juga dapat dilakukan sebagai bahan perbandingan guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan objek yang diteliti. Uji keabsahan data biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2015:269), Menyatakan teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sugiyono (2015:270) menjelaskan ada beberapa macam triangulasi, yakni :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian di cek dengan teknik wawancara.
3. Triangulasi waktu, mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda. Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Waktu yang digunakan peneliti yaitu ketika pagi dan siang.
4. Triangulasi metode, teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
5. Triangulasi teori, penggunaan sudut pandang teoritis yang berbeda untuk menafsirkan data dan menentukan hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Terry dalam Burhanuddin (1994 : 251) Pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dicapai yaitu standard, apa yang sedang dihasilkan yakni pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yakni sesuai standard. Kurangnya pengawasan hutan mangrove akan mengakibatkan kerusakan kualitas dan kuantitas potensi sumber daya ekosistem pesisir, di mana hutan mangrove itu berada bahkan hilangnya fungsi lindung lingkungan dari hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerusakannya dan dilakukan pengawasan lebih lanjut pada hutan mangrove.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam pengawasan hutan mangrove sicanang dengan menggunakan 2 indikator sebagai dasar dalam penelitian ini Untuk mengetahui kinerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam pengawasan hutan mangrove sicanang maka peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam pengawasan hutan mangrove sicanang dan adapun hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

3.1 Tanggung jawab dan wewenang pegawai dinas lingkungan hidup

Dwiyanto (2006) menyebutkan bahwa mengukur kualitas dari sebuah penyelenggaraan pelayanan adalah bagaimana tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga tersebut, dimana setiap anggota wajib bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Struktur organisasi memberikan gambaran jelas tugas, peran dan fungsi dalam kelembagaan organisasi. Struktur dalam organisasi dinas lingkungan hidup di tentukan oleh kepala dinas sendiri dalam memilih anggota yang berkompeten dan berkualitas di bidang tersebut dan yang paling utama adalah mereka yang bertanggung jawab atas tugasnya.

Dimana struktur organisasi adalah garis kordinat tentang fungsi yang bekerja secara wewenang dari pengambilan keputusannya tetap dilakukan oleh kepala dinas lingkungan hidup tetapi juga bekerja dengan landasan visi dan misi dinas tersebut, hal itu di perjelas dalam wawancara bersama kepala dinas lingkungan hidup bapak Hedi Novaria :

“Kalau untuk struktur sendiri bapak tidak bisa menjelaskan bagaimana dek, karna itu juga bagian dari kewenangan bapak sendiri sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Tapi dalam pemilihan anggota pegawai dalam struktur yang pastinya kita pilih orang yang berkompeten didalam bidangnya dan sejalan dengan visi dan misi yang kita bangun di dinas lingkungan hidup” (Jumat, 12 juli 2024)

Melihat tentang struktur dan pemilihan pegawai adalah tahap awal dalam penentuan komitmen pegawai dalam pengatasan masalah dalam sampah, bagaimana memilih anggota pegawai yang tidak kompeten dalam bidangnya. Seperti yang di jelaskan dwiyanto (2006), Adanya komitmen di setiap bidang untuk melaksanakan tanggung jawab yang bersesuaian dengan wewenang yang di miliki setiap bidang, komitmen di setiap bidang tersebut menjadi seseorang bertanggung jawab terhadap kinerja dan capaian kinerja yang harus dicapai dalam kurung waktu tertentu, sehingga termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Dengan adanya komitmen, maka akan mudah untuk mencapai target kinerja yang telah dibuat. Seperti yang di tambahkan bapak kepala dinas.

“Pegawai disini memang harus menjaga integritas setinggi tingginya, setiap pegawai harus berkomitmen untuk mencapai tujuan visi dan misi kita, karna kan di dinas lingkungan hidup ini juga ada aturan dan peraturan memang harus di tekankan di integritas pegawai itu “ (Jumat, 12 juli 2024)

Dari wawancara yang dilakukan oleh kepala dinas lingkungan hidup, kita dapat melihat bagaimana struktur organisasi sebuah lembaga merujuk pada cara organisasi tersebut diatur secara hierarkis dan fungsional. Pada tingkat kepala dinas sosial dan kepala bidang bertanggung jawab atas visi strategis dan

pengambilan keputusan besar. Di tingkatan pegawai, pegawai dinas lingkungan hidup bekerja langsung dalam menjalankan kegiatan harian yang mendukung tujuan dinas lingkungan hidup.

Peneliti juga mewawancarai camat dari kecamatan sei rampah ibu Fitrianti, peneliti mau melihat bagaimana bentuk responabilitas dari kecamatan perihal kondisi masyarakat sei rampah dalam pengelolaan sampah.

“ Kami di kecamatan sei rampah gakada aturan baku dalam pengelolaan sampah, karna sejauh ini saya lihat dari masyarakat ibu sendiri masi tergolong tertib dalam mengatur sampah rumah tangganya. Karna sejauh ini belum pernah ada keluhan soal sampah yang muncul ke kami bahkan sampai sekarang ya, sampai saya terpilih jadi camat gaktau sama kepemimpinan sebelumnya gimana” (Minggu, 14 Juli 2024)

Sejauh ini belum ada bentuk keluhan yang muncul dari masyarakat sei rampah perihal sampah, bentuk kordinasi Antara dinas lingkungan hidup kepada kecamatan sei rampah juga tidak itu di tambah oleh ibu Fitrianti kepala camat sei rampah,

“ Kalau bentuk kordinasi yang utuh ya? Kek susunan mekanisme pengelolaan sampah dll? Kalau untuk kecamatan biasanya hanya bersifat penginformasian aja bahwa dinas lingkungan mau melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang pengelolaan sampah atau juga meminta bantuan ke camat menginfokan masyarakat yang mau berlangganan sampah dan kami camat biasanya langsung menginfokanya kepada kelurahan kelurahan yang di sei rampah. Tapi kalau kayak bentuk secara sistematis dari dinas lingkungan hidup ke kecamatan sei rampah sejauh ini belum ada, bukan berarti gak ada. Nanti kita buat “ (Minggu, 14 Juli 2024)

Berarti dalam bentuk garis kordinatnya memang tidak ada aturan baku yang menjelaskan bagaimana keterlibatan kecamatan sei rampah kepada dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah, semua hanya bersifat penginformasian. Palingan ada bentuk kordinasi penginformasian dari dinas lingkungan hidup kepada kecamatan sei rampah bagi masyarakat yang mau berlangganan kepada dinas lingkungan hidup perihal pembuangan sampah.

3.2 Komitmen Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup berperan dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat. Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai target Indonesia Bersih Sampah 2025. Target tersebut adalah mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Dinas lingkungan hidup kabupaten serdang bedagai berusaha untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan, hal itu di paparkan oleh kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas bapak Arifin Pane.

“Kalau pegawai disini kami komitmen untuk mengatasi masalah persampah di kabupaten serdang bedagai khususnya di kecamatan sei rampah walaupun adek liat sendiri dengan fasilitas saran dan prasarana yang terbatas kita miliki, Kami melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terus menerus bahkan sampah diluar kita juga kita yang mengatasi. Makanya kalau ditanya komitmen pasti semua kami disini komitmen mengatasi permasalahan sampah ini” (Senin, 15 Juli 2024)

Peneliti menanyakan lebih lanjut dengan bentuk komitmen yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, karna dari beberapa pra peneliti yang sudah peneliti lakukan banyak juga pegawai yang nongrong atau keluar di luar waktu jam kerja, bahkan setiap peneliti ke lokasi TPA sei rampah tidak ada satu pun pegawai dinas lingkungan hidup dalam mengawasi TPA tersebut. Maka dari itu peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat kecamatan sei rampah bapak putra.

“Kalau pegawai dinas lingkungan hidup tidak ada ya dek yang pernah saya liat datang kesini, palingan tukang tukang pembuangan sampah ni ajala. Terus kalau bentuk komitmen pegawai dinas lingkungan hidup juga saya tidak tahu gimana “ (Rabu, 17 Juli 2024).

Bukan hanya itu peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat di sei rampah untuk memastikan bentuk komitmen dari dinas lingkungan hidup sendiri, bapak masri.

“ Bentuk komitmen dinas lingkungan hidup ya bah? Gaktau juga saya. selama saya disini juga gak pernah ada sosialisasi persampahan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup di kecamatan sei rampah. Kalau buang sampah palingan saya langsung buang ke TPA. Di TPA juga saya gak pernah nengok ada petugas dinas lingkungan disitu”.(Rabu, 17 juli 2024)

Dari kedua pernyataan dari masyarakat tersebut juga gakbisa memastikan bagaimana bentuk komitmen sendiri dari dinas lingkungan hidup dalam penanganan persampahan di kecamatan sei rampah. Sehingga peneliti bertanya lebih mendalam kepada kepala persampahan dinas lingkungan bapak arifin pane.

“bentuk komitmen kami sudah jelas, penanganan sampah dan pemberisahan sampah diseluruh 7 kabupaten serdang bedagai termasuk juga kecamatan sei rampah. Karna yang tadi bapak jelaskan juga sendiri. Fasilitas kami terbatas kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tapi ingat juga gakbisa kami sosialisasi semua. Dinas lingkungan hidup juga sangat terbatas dalam segi fasilitas, SDM dan yang lainnya. Tapi kalau ditanya komitmen? Saya yakin seratus persen kami semua didinas lingkungan hidup ini komitmen menanganin persampahan di kabupaten serdang bedagai”

Dinas lingkungan hidup memang memiliki upaya yang dilakukan dalam pengatas masalah sampah itu sendiri,tapi bentuk komitmen jelas itu tidak ada sama sekali karna kepercayaan masyarakat kepada dinas lingkungan hidup sangat minim. Pengelolaan sampah yang dilakukan dari tahun ke tahun tetap sama. Masyarakat masi terjebak oleh system pengelolaan sampah yang tergolong udah sudah tidak relevan untuk di masa sekarang. Bukan mengurangi angka sampah bahkan menambah menumpukan sampah yang mengakibatkan beberapa aroma yang tidak sedap di rasakan oleh masyarakat yang di sei rampah.

3.3 Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam konteks kelembagaan merujuk pada infrastruktur fisik dan non-fisik yang di kelola oleh berbagai lembaga atau organisasi untuk mendukung berbagai kegiatan dan layanan masyarakat. Seara fisik, ini termasuk bangunan public seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, jalan raya, jembatan, sistem tranportasi umum, serta instalasi air bersih dan sanitasi. Lebih dari sekedar bangunan, sarana ini mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pemerintah daerah, badan-badan pengelola infrastruktur, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam sector ini.

Di dinas lingkungan hidup perencanaan sarana dan prasarana selalu di optimalkan menjadi lebih baik tapi dalam proses lapangnya sering tidak bekerja sesuai dengan yang di rencanakan seperti contohnya dinas lingkungan hidup melakukan iuran wajib warga yang berlangganan pengambilan sampah rumah tangga, seperti yang di tambah sama kepala dinas lingkungan hidup

“ Kalau sarana kepada masyrakat, kami menyediakan tong tong sampah untuk sampah rumah tangga tapi itu bagi yang berlangganan saja. Bagi berlangganan ada petugas kita yang ambil sampah di tong tong itu. tapi kan sudah saya bilang bisa aja satu tong sampah jadi 5 kepala keluarga disitu. Padahal bagi yang tidak berlangganan kami menyediakan tempat pembuangan sampah tanpa kami datengin atau mereka mau membakar sampah mereka sendiri di rumah. Boleh juga “ (Senin, 15 Juli 2024)

Dari wawancara dan analisis penulis di lapangan, memang banyak terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sarana dan prasarananya itu sendiri sudah di sediakan oleh dinas lingkungan hidup, dan dari kabid lingkungan hidup juga menambahkan perihal perencanaan .

“ Sebenarnya perihal sarana dan prasana itu sudah kami lakukan perencanaan dari awal dek, tapi tetap kadang sarana yang kami miliki pun juga tidak maksimal artinya masi terbatas, jadi kami optimalkan dengan sebaiknya. Terus kan perencanaan kami juga ada tahap awal dan tahap akhir, bagaimana proses pengambilan sampah rumah tangga ke tahap pembuangan akhir itu juga sudah kami lakukan perencanaan “ (Senin, 15 Juli 2024)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kabid dinas lingkungan hidup dapat dilakukan bahwa permasalahan berada pada fasilitas sarana dan prasaran yang sangat terbatas dan tidak optimalnya dalam bekerja itu dapat dilihat dari data yang peneliti temukan pada kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dari tahun 2021-2024.

Dari dinas lingkungan sendiri tidak memiliki fasilitas untuk di terapkan ke kalangan masyarkat, kepala dinas lingkungan hidup juga menambahkan tetang sarana dan prasarana ke masyarakat .

“Tidak ada, karna dari misbah lihat sendiri kami dari dinas lingkungan hidup sendiri juga sarana dan prasarananya terbatas bagaimana kami bisa berikan kepada masyarakat sedangkan kita dari dinas lingkungan hidup sendiri terbatas. Palingan fasilitas kita, kita ada juga pemberian tong sampah itupun kepada fasilitas-fasilitas umum misalnya masjid, sekolah kalau ke masayrkat kita belum ada kalau pun ada pemberian keranjang-keranjang sampah itupun kepada yang berlangganan, kalau masyarakat orang per orang kita belum ada. Makanya sebenarnya kalau misbah lihat itulah yang seharusnya yang di angkat “ (Senin, 15 Juli 2024)

Responibilitas dinas lingkungan hidup perihal sarana dan prasarana emang sangat jelas dapat disimpulkan sangat tidak optimal, bukan hanya perihal sarana dan prasarana yang terbatas tetapi juga bentuk penginformasian pengelolaan sampah kepada masyarakat juga tidak ada sama sekali. Apa lagi tong sampah yang diberikan kepada masyarakat hanya mereka yang berlangganan padahal kalau seandainya dinas lingkungan hidup bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan baik ini menjadi aset yang bisa di manfaatkan.

3.4 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, dwinyanto menganggap pengelolaan sumber daya manusia adalah hal yang paling utama dan harus dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi benar benar tercapai karna memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Peneliti bertanya kepada kepala dinas hedi novria, bagaimana proses pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah.

“Kalau pengelolaan sumber daya manusia, kami mengikutin aturan dan peraturan yang harus diikutin oleh pegawai pegawai sini kalau tidak ada sanksi besarnya karna kan ada tim juga yang mengawasi kinerja setiap pegawai ini gimana, terus kalau dalam pengelolaan sampah saya pasti meilih anggota anggota yang memang sudah berpengalaman dibidang itu dan juga memang kompten dan memang bidang dia. Biasanya ada juga pelatihan pelatihan yang dilakukan didinas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas pegawainya juga”. (Senin, 15 Juli 2024)

Dalam hal ini berarti ada upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk mengelola dan meningkatkan pegawai yang ada di dinas lingkungan hidup, karna bagaimana juga dalam proses tujuan organisasi adanya pengelolaan sumber daya manusia yang benar benar serius untuk dilakukan.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia sendiri terkhususnya perekrutan pegawai petugas kebersihan tidak adanya sistematis yang jelas bagaimana system perekrutan yang dilakukan, banyak beberapa pegawai yang di rekrut adalah mereka yang memang mau bekerja secara sukarela menjadi

pegawai kebersihan sendiri, makanya dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam kepada camat sei rampah fitrianti, tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri.

“ Kalau perekrutan sendiri jujur ibu tidak tahu menahu bagaimana system perekrutan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menentukan pegawai kebersihan apakah yang memiliki kualifikasi tertentu atau bagaimana, tapi sejauh ini memang dinas lingkungan hidup pasti konfirmasi ke kami kecamatan sei rampah dalam pengelolaan sampah itu sendiri termasuk juga pegawai kebersihan” (Minggu, 14 juli 2024)

Pada wawancara yang dilakukan kepada kepala kecamatan sei rampah dapat diketahui bahwa bentuk kordinas dalam pengelolaan sumber daya manusia terkhususnya dalam pengelolaan sampah tidak ada dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Bahkan untuk system kerja yang dilakukan oleh pegawai kebersihan adalah bersifat kontrak biasanya satu bulan dua bulan bahkan setahun, atau dari wawancara yang dilakukan juga kadang sistemnya serabutan artinya adanya panggilan pekerjaan tanpa adanya kontrak yang dilakukan. Kepala kecamatan sei rampah juga menambahkan,

“ Pengelolaan sumber daya manusia memang harus dilakukan dan ditingkatkan termasuk juga dalam pengelolaan sampah itu sendiri kan. Hal yang harus pertama kali di perbaiki adalah sistemnya itu sendiri. Makanya semoga kedepannya system Antara kecamatan dan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dilakukan dengan sebaik baiknya harapan ibu seperti itu. Mungkin kedepannya bakalan dilakukan tindakan yang lebih serius”

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengelolaan sumber daya manusia kita harus banyak melihat berbagai aspek dalam pengelolaan, terkhususnya tentang upaya dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh SDMnya, kalau berdasarkan yang peneliti amati tidak ada upaya serius itu sendiri dalam pengkatkannya SDMnya, seperti sangat jarang dilakukan webinar ataupun pelatihan pegawai perihal pengelolaan sampah itu sendiri, tapi dalam upaya disiplin pegawai dinas lingkungan hidup melakukan aturan dan peraturan yang mengikat tentang ketenagakerjaan yang harus dilakukan kepada setiap pegawai yang ada di dinas lingkungan hidup sendiri.

3.5 Metode Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah

Metode kerja adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, atau metode kerja juga bisa dapat diartikan sebagai teknik tata cara kerja untuk memperbaiki sistem kerja bagi organisasi/perusahaan. Dwiyanto memiliki pandangan soal metode kerja menurut dia kinerja merupakan haso dari usaha seseorang yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Dwinyanto mengemukakan ada beberapa hal yang dapat diliha apakah sebuah metode kerja dapat dikatakan berhasil, melihat bagaimana kualitas dari kinerja itu sendiri baik bagaimana sebuah organisasi mengelola dan mengatur anggota atau pegawainya, dari segi kuantitas bagaimana bentuk pengelolaan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebuah organisasi apakah jumlah tersebut cocok untuk meningkatkan sebuah pelayanan, kedisiplinan atau ketetapan waktu baik itu dalam proses kinerja ataupun proses penyelesaian sebuah proyek, evekticitas juga dilihat bagaimana penyelesaian sebuah masalah atau proses di selesaikan secara evektif, kemandirian perlu adanya metode kerja yang dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak luar ataupun pihak mitra yang bekerja sama.

Dalam observasi peneliti ke lokasi kantor dinas lingkungan hidup, Peneliti melihat bagaimana metode kerja yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup terkhususnya dalam proses penanganan sampah. Dalam wawancara peneliti dengan kepada bidang persampahan dinas lingkungan hidup bapak arifine pane,

“ Kalau metode kerja kami ya dek di tahap internal, kami ada kegiatan rapat rutin la tentang bagaimana progres dan juga evaluasi persampahan di kabupaten serdang bedagai ini, biasanya seperti menyusun informasi pengelolaan sampah, menetapkan target pengurangan sampah, merumuskan kebijakan pengurangan sampah tapi kalau kebijakan biasanya udah kami rapatkan di awal. Palingan untuk sekarang kami lebih memantau dan mengawasi pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3” (Senin, 15 juli 2024)

Dalam segi internal dari dinas lingkungan hidup terkhususnya bidang pengelolaan sampah, peneliti melihat bahwa hampir semua pegawai ada dilokasi tidak ada satupun pegawai yang keluar dari jam kerja, meraka pada sibuk mengerjakan kegiatan kegiatan tentang pengelolaan sampah. Kalau dilihat dari segi kuantitas sendiri bidang pengelolaan sampah tergolong teratur dalam mengelola setiap pegawainya tidak adanya tumbuh tinggi kinerja merepa memiliki porsirnya masing-masing, seperti yang di tambahkan bapak arifine pane,

“ Kalau dalam segi kualitas anggota anggota saya. saya jamin jago jago semua kalau masalah pengempatan ini itu, itu balek lagi ke yang atas kan dek, bapak sebagai kepada bidang mengotrol dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan kita kita sama memberantas sampah sampah di kabupaten serdang bedagai. Itu sih kalau metode kinerjanya punya tim timnya la. Ada yang mengawasi kinerja kami kan ada juga timnya dari sana. tapi kalau dari bapak sendiri sama anggota udah di pastikan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kabupaten serdang bedagai” (Senin, 15 juli 2024)

Dari pernyataan bapak arifine pane, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode kerja yang dimiliki oleh bidang pengangan sampah sebenarnya tergolong terselesaikan atau dapat dikatakan berhasil, hanya saja memang akses seperti sarana dan prasarana sendiri yang terbatas dalam penanganan sampah untuk kabupaten serdang bedagai.

Pekerja yang biasanya dari masyarakat juga merasa pemberian upah kepada mereka sangat sedikit sehingga mereka dalam bekerja tergolong tidak terlalu serius, karna dari pernyataan kepala bidang pengelolaan sampah bapak arifin pane,

“ Metode kerja kami kalau di lapangan ya dek, kami mendata pertama kendaraan mana yang siap pakai tapi karna paham sendiri terbataskan jadi akses kami juga terbatas, terus juga banyaknya beberapa pekerja yang gak tertip, banyakni yang komplek karna upah yang di berikan terlalu sedikit sehingga mereka kerja malas malasan, dilapangan ada juga pegawai kami yang mengawasi kinerja pegawai ini, namanya gakda tinggal coret, datang terlambat upah tinggal di potong, pegawai kami di setiap setiap lokas TPA juga, disana melihat la bagaimana kondisi TPA sama apakah para pekerja ini membuang sampah ke lokasi TPA atau gak, pegawai kami yang rumah ke rumah juga ada tapi karna jumlah pegawai kami yang terbatas cara itu gak terlalu evisien sehingga kami biasanya sosialisasi dari kantor kantor kecamatan ataupun setiap kepala lingkunganya” (Senin, 15 juli 2024)

Kesadaran akan pengelolaan sampah di masyarakat tergolong sangat kurang, karna hanya beberapa masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah itu sendiri. Dinas lingkungan hidup tergolong kurang evisien dalam memaksimalkan metode kerja di lapangan karna akses yang dimiliki mereka sangat terbatas, dalam pengelolaan sampah bukan hanya satu pihak tapi adanya kesadaran di kedua pihak atau bahkan tiga pihak yaitu pemerintah pusat sendiri yang menanggapi masalah sampah ini adalah hal yang serius untuk dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan temuan – temuan yang didapatkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan sosial kepada kecamatan sei rampah kurang evisien karna dari yang peneliti lihat tidak adanya upaya berbeda yang dilakukan dinas lingkungan sosial dalam penanganan sampah di masyarakat bahkan hampir sama dengan kepemimpinan sebelumnya. Dilihat dari tanggung jawab dan wewenang dinas lingkungan hidup , tidak adanya upaya yang benar benar serius dalam pengelolaan sampah itu sendiri terkhususnya dalam proses lapangan langung. Kalau dalam tahap perencanaan dan rancangan tergolong cukup oke dalam penanganan sampah tapi eksekusi yang dilakukan tergolong sangat kurang. Dalam segi komitmen sendiri, memang terlihat nyata komitmen yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah tentang upaya upaya dan rancangan rancangan yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan sampah. Tetapi tetap ketika dinas lingkungan hidup memiliki komitmen dalam penanganan pengelolaan sampah tapi dari masyarakat itu tidak maka tujuan dari organisasi tersebut tidak berjalan.

Sarana dan prasarana yang benar benar terbatas mempengaruhi kinerja dari dinas lingkungan itu sendiri dalam pengelolaan sampah, bahkan fasilitas yang dimiliki seperti becak, mobil, dan truk sampah itu adalah kendaraan dari lima tau sepuluh tahun belakang yang sebenarnya tidak layak pakai digunakan. Cuma ada dua truk sampah yang bisa digunakan untuk memfasilitas tujuh kecamatan termasuk kecamatan Sei Rampah. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan tahap awal yang benar benar dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai, masalahnya pada dinas lingkungan hidup tidak ada upaya serius dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Mengenai metode kerja yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dalam segi internal dan eksternal khususnya dalam pengelolaan sampah, dalam segi internal sebenarnya tergolong lancar dikarenakan adanya pengawasan dan aturan pertarun ketat yang harus ditaatkan, yang menjadi permasalahan adalah metode kerja eksternal yang dimana metode ini melibatkan pekerja masyarakat, masyarakat, dan pegawai kecamatan. Dalam keempat indikator yang peneliti ambil menurut dwiyanto, sebenarnya dari dinas sosial memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan sampah tapi tidak adanya upaya serius yang dilakukan karena terbatasnya akses yang dimiliki dinas lingkungan hidup seperti sarana dan prasarana yang dimiliki.

Karna banyak juga ketidak pedulian masyarakat tentang sampah ini apa lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke jalan, kesungai bahkan ke tong sampah masyarakat yang berlangganan kepada dinas lingkungan hidup.

Referensi

- Cahyani, P. D., Adys, A. K., & Abdi. (2021). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, 2(5), 1595–1614.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Cantika, V. D. A., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2023). *Responsibilitas Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Publik Di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur*. 282.
- dlh.serdangbedagaikab.go.id. (2021). *Bupati Darma Wijaya Harap Perkantoran Sergai Miliki RTH yang Bersih, Teduh dan Berkelanjutan*.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press.
- Hajar Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Hardiyanti, K., & Subowo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1–15.
- Katadata.co.id. (n.d.). *Inilah Negara Penghasil Sampah Terbesar Dunia, Ada Indonesia?*
<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/07/05/inilah-negara-penghasil-sampah-terbesar-dunia-ada-indonesia>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
<https://doi.org/10.20527/jpkmi.v4i2.3843>
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. CV Alfabeta.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. CV Alfabeta.
- Rakhman, A. N. (2021). Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Lingkungan. *Jurnal Lingkungan*, 3.
- Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2015). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31–39.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik Reformasi, Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. PT Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.